

Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

**Mochamad Fachri Rizky Zamzami*, Novie Indrawati Sagita,
Jovanscha Qisty Adinda FA**

Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Jatinangor Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

*Correspondence: fachribdg13@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN) telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang menjadi landasan diselenggarakannya kegiatan diklat atau pelatihan kepemimpinan kepada para pejabat administrator. Penelitian ini akan membahas tentang kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun 2023 yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial pada jabatan struktural PNS. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kegiatan diklat kepemimpinan struktural yang didasarkan kepada pengukuran sumber, proses, dan sasaran. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Manajerial untuk jabatan Administrator (PKA) Angkatan IV tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat terkendala pada aspek terbatasnya jumlah pengamat kelas, kemampuan peserta yang belum adaptatif terhadap metode pembelajaran yang diterapkan, serta terganggunya konsentrasi peserta karena harus menjalankan tugas pekerjaan di unit kerjanya disela kegiatan pelatihan berlangsung, sehingga aspek proses tidak berjalan optimal.

Kata kunci: Efektivitas; Kepemimpinan Administrator; Pelatihan ASN

ABSTRACT

The State Administration Institute of the Republic of Indonesia (LAN) has issued Decree of the Head of the State Administration Agency Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Implementing Structural Leadership Training Activities which is the basis for holding education and leadership training activities for administrator officials. This research will discuss the 2023 Class IV Administrator Leadership Training (PKA) activities which were held in order to meet managerial competency standards in structural civil servant positions. The method used in this research is a qualitative method to analyze the effectiveness of implementing structural leadership training activities which is based on measuring sources, processes and targets. Data collection techniques in this research were carried out through interviews, observation, literature study and documentation. The results of this research show that the implementation of managerial leadership training for the position of Administrator (PKA) Class IV in 2023 carried out by the West Java Province Human Resources Development Agency is hampered by the limited number of class observers, the ability of participants who have not yet adapted to the learning methods applied, as well as disrupting participants' concentration because they had to carry out work tasks in their work unit in between training activities, so that aspects of the process did not run optimally.

Keywords: Effectiveness, Administrator Leadership, ASN Training

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan individu produktif yang berfungsi sebagai roda penggerak yang keberadaannya sangat krusial dalam membangun ekosistem organisasi. Pada prosesnya, Sumber daya manusia juga merupakan aset organisasi yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia pada umumnya dibagi kedalam dua segmentasi, yakni makro SDM makro yang artinya jumlah penduduk dalam usia produktif pada suatu wilayah dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan (Susan, 2019), dimana pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan *out put* seorang pegawai yang cekatan dan berkompeten dalam menghasapi setiap tuntutan tugas yang dijalankan pada jabatannya.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang krusial dalam menentukan kualitas individu maupun kelompok di suatu organisasi. Pada sektor pemerintahan, Keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan manusia yang dapat mengelola daerah dengan baik. Untuk dapat mewujudkannya, pengelolaan manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan dan harus berjalan secara efektif dan efisien (Oktarina & Mustam, 2018). Sumber Daya Manusia memegang peranan penting terutama dalam kehidupan organisasi publik, karena ia menjadi penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi, dan peranannya tidak dapat digantikan oleh apapun (Syafri & Alwi, 2014). Sumber daya manusia tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) didalam peraturan terbaru Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai bagian dari Aparatur Negara yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat (*public service*) secara jujur, adil, dan merata dalam pelaksanaan tugas negara, pemerintah, dan Pembangunan dengan berpegang kepada prinsip kesetiaan dan ketaatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), Anwar Anas mengatakan bahwa jumlah aparatur sipil negara yang aktif bekerja sampai bulan desember 2023 tercatat sebanyak 4.465.768 aparatur dengan persentase sebanyak 22% bekerja di instansi pusat dan 78% lainnya bekerja di pemerintahan daerah (Emir, 2024). Dari angka tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kembali mengerucutkan pengelompokan aparatur sipil negara kedalam Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II yang diterbitkan pada bulan Januari 2024. Adapun didalamnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membagi kategori aparatur sipil negara berdasarkan status kepegaiwannya. Yakni, aparatur sipil negara berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) (Badan Kepegawaian Negara, 2024).

Melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat mengadakan pelatihan kepada minimal 30 orang peserta yang berasal dari instansi dan unit kerja yang berbeda pada setiap angkatannya.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan salah satu pelatihan kompetensi yang harus diikuti oleh para pejabat administrator secara berkelanjutan guna melatih, menempa, dan memperkaya wawasan calon-calon pemimpin masa depan yang akan menjabat di institusi pemerintahan. Selain itu, Adapun aspek lain yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) adalah kemampuan pada bidang komunikasi dan negosiasi, mengembangkan teknologi informasi (IT), serta berpikir kritis (Chandra, 2020)

Kompetensi yang dimaksud mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku seorang aparatur sipil negara yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai pejabat administrator. Untuk mencapai tujuan tersebut, pejabat administrator harus mampu memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan secara optimal sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah disepakati.

Pelatihan kepemimpinan Administrator (PKA) dianggap penting karena memiliki dampak positif dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan suatu organisasi atau institusi pemerintah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelatihan kepemimpinan administrator penting menurut Pimpinan Penyelenggara Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa barat :

1. Peningkatan keterampilan: Pelatihan kepemimpinan membantu administrator mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola tim, mengambil keputusan yang baik, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Ini membantu mereka menjadi pemimpin yang lebih kompeten.
2. Peningkatan efisiensi operasional: Administrator yang terlatih dengan baik dapat membantu organisasi berjalan lebih efisien. Mereka dapat mengidentifikasi proses-proses yang tidak efisien dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan.
3. Pengambilan keputusan yang lebih baik: Administrator yang terlatih dalam kepemimpinan cenderung membuat keputusan yang lebih baik. Mereka memiliki keterampilan analitis, perencanaan, dan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari sebuah keputusan.

4. Pengembangan Tim: Kepemimpinan administrator yang efektif mendukung perkembangan anggota tim.

Mereka dapat memberikan panduan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk membantu anggota tim mencapai potensi terbaik mereka.

Dengan demikian, BPSDM Jabar yang merupakan badan pelatihan terakreditasi, menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ditahun 2023 sebagai upaya untuk mengembangkan potensi aparatur sipil negara, khususnya kepada pegawai negeri sipil yang kemudian hal ini diatur pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan secara *blended learning* menggunakan metode pembelajaran mandiri (*self learning*), pembelajaran berbasis teknologi (*E-Learning*; *synchronus* dan *asynchronus*), dan pembelajaran berbasis klasikal yang didesain untuk membantu perangkat daerah menumbuh kembangkan pembelajaran individu dan organisasi, pengetahuan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan kerja di era reformasi birokrasi 4.0 saat ini. Pada prosesnya, terdapat kendala yang dialami oleh pihak penyelenggara pelatihan kepemimpinan. Khususnya, dari segi sumber daya manusia yang harus dapat beradaptasi dengan kondisi pelatihan ASN yang dilaksanakan secara *blended learning*. Menurut penuturan dari Pimpinan Penyelenggara Diklat dan Pengamat Kelas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Provinsi Jawa Barat, setidaknya terdapat beberapa kendala mengenai pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan IV Tahun 2023, diantaranya yaitu :

1. Sebagian peserta belum beradaptasi secara optimal terhadap metode pembelajaran yang diterapkan,
2. Terganggunya konsentrasi peserta karena harus menjalankan tugas pekerjaan di unit kerjanya disela kegiatan pelatihan berlangsung,
3. Terbatasnya jumlah pengamat kelas,
4. Serta jaringan internet yang acap kali mengalami kendala ketika pembelajaran diselenggarakan secara daring.

METODE

Metode penelitian yang pakai pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Sugiyono, 2011) Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alamiah (berbeda dengan eksperimen), dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel data dilakukan secara sengaja (*purposive*) dan berkelanjutan (*snowball*). Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2011)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan - kegiatan tertentu serta berbagai peristiwa secara terperinci dan mendalam.

Berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi kegiatan penelitian, pendekatan kualitatif mendukung penulis dalam memperoleh kata-kata baik tertulis/lisan dari objek yang diamati, pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga memfokuskan perhatian khusus pada evaluasi dan menganalisis nilai efektivitas program pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

HASIL

Pendekatan Sumber

Kemampuan organisasi dalam memanfaatkan lingkungan untuk mendapatkan berbagai jenis sumber yang sifatnya langka dan mahal

Fasilitas

Salah satu aspek yang menjadi *highlight* pada bagian ini ialah kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan di BPSDM Jabar. Pimpinan penyelenggara diklat BPSDM Jabar menerangkan bahwa :

“Fasilitas alhamdulillah sudah lengkap ya. Kita punya beberapa fasilitas penunjang pelatihan seperti ruang kelas berproyektor, perpustakaan juga ada, sarana prasarana olahraga kita punya beberapa lapang. Ada lapang tenis, lapang futsal, ruang auditorium, dan lain sebagainya. Kalo buat fasilitas insyaallah sudah sesuai standar. Apalagi kita juga punya tempat asrama sekelas hotel Bintang tiga buat peserta. Jadi peserta bisa nyaman lah berkegiatan disini” (Wawancara, 16 Februari 2024)

Berdasarkan keterangan diatas, BPSDM Jabar memiliki sarana prasarana yang terbilang cukup lengkap untuk keperluan pelatihan klasikal dan non klasikal berstandar nasional. pengamat kelas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2023 juga memberikan keterangan bahwa:

“ Sejauh ini, untuk fasilitas alhamdulillah sudah baik sih. Peserta pelatihan juga gak ada complain yang serius ke saya tentang sarana prasarana. Sarana prasana yang ada di BPSDM kan juga lengkap ya. jadi alhamdulillah sudah baik ” (Wawancara, 1 Maret 2024)

Selanjutnya, peserta kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023 juga turut berpendapat tentang kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan pelatihan di BPSDM Jabar :

“Jadi memang, sarana prasarana ini kan menjadi faktor penunjang ya dalam kegiatan semacam ini. Kan kalo fasilitasnya memadai, nyaman, dan mudah dijangkau aksesnya, out putnya juga kan nanti bagus. Kalo menurut saya, BPSDM Jabar sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan kemarin. Saya rasa teman-teman alumni PKA juga setuju. Kenapa? Sarana prasarana udah bagus sekali. Kita di kasih fasilitas penginapan setara hotel Bintang tiga kan kemarin. Baru PKA itu teh, gimana PKN? Pasti lebih wah lagi. Jadi gak ada masalah dari saya soal fasilitas, semuanya udah baik dan memuaskan. Kalaupun ada masalah, ya masalah teknis minor biasa.” (Wawancara, 14 Maret 2024)

Berbekal pendapat-pendapat tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BPSDM Jabar selaku penyelenggara kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023 sudah mampu menyediakan fasilitas penunjang kegiatan pelatihan dengan baik. Hal ini berdasarkan kepada keterangan penyelenggara itu sendiri yang dikonfirmasi oleh peserta PKA Angkatan IV Tahun 2023 bahwa benar fasilitas yang tersedia di BPSDM Jabar sudah sangat memadai dan menunjang kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023 dengan baik. Sebagai data tambahan, berikut daftar fasilitas penunjang kegiatan pelatihan yang berhasil penulis himpun dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Tabel 1. Fasilitas Penunjang Pelatihan di BPSDM Jabar

Jenis	Jumlah
Gedung Kantor	1 Unit
Rumah Asrama	89 Unit
Kamar Setara Hotel Bintang 3	250 Unit
Aula Auditorium	1 Unit
Ruang Makan	1 Unit
Ruang Rapat Amphiteater	2 Unit
Ruang Kelas	20 Unit
Laboratorium Bahasa	1 Unit
Laboratorium Komputer	1 Unit
Perpustakaan	1 Unit
Ruang Arsip	1 Unit
Ruang Kesehatan Poliklinik	1 Unit
Gedung Lembaga Sertifikasi Profesi LSP	1 Unit
Ruang Kebugaran Fitness	2 Unit
Masjid Umum	1 Unit
Mushola	1 Unit
Gudang dan Aset	1 Unit
Sport Centre	1 Unit
Command Centre	1 Unit
Ruang Multimedia	1 Unit

Sumber : LAKP BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Anggaran

Selain itu, pelaksanaan kegiatan PKA angkatan IV tahun 2023 ialah segi anggaran biaya yang menjadi jauh lebih efisien dibanding kegiatan pelatihan yang dilakukan secara murni klasikal. Berkenaan dengan hal tersebut, Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar mengatakan bahwa :

“jauh menurun drastis kalo kita dengan murni klasikal di kelas terus di BPSDM. Itu kan Makan minumnya juga kebayang berarti kalo 1 kelas 40 orang kalo dikali 3 bulan kali berapa kali makan kan lumayan. Tapi kalo blended kan berkurang. Dia hanya datang nanti pembukaan beberapa hari, kemudian klasikal, seminar, stulanya berapa hari, kemudian dia nanti masuk lagi seminar kedua. Sedikit waktunya.” (Wawancara, 16 Februari 2024)

Walaupun tidak dijelaskan secara terperinci soal anggaran pelaksanaan kegiatan PKA di tahun 2023. Pimpinan Penyelenggara diklat BPSDM Jabar menerangkan bahwa adanya efisiensi dari segi anggaran yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan PKA secara murni klasikal. Beliau juga menambahkan bahwa :

“Kan tergantung semuanya harus dari dokumen anggaran. Kalo dokumen anggaran kan dari setahun sebelum. yang tahun 2025 berarti kan 2024 sudah dipersiapkan. Nah itu bagaimana caranya, kita tanya kabupaten kota. Biasanya kita tanya kabupaten kota. Berapa anda akan mengirim untuk pelatihan PKA, PKP. Nah itu dihitung semua. Contoh nih sekarang yang masuk ke BPSDM di tahun 2024 berkembang dari 2023 kemarin itu sudah hampir pkp tuh 9-10 kelas, PKA 6 kelas. Nah itu kan di itung. Kalo usulan angkanya segitu, tinggal kali rupiahnya” (Wawancara, 16 Maret 2024)

Ketersediaan SDM

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis ketika menjadi mahasiswa magang di BPSDM Jabar pada tahun 2023 dan keterangan salah satu informan, ditemukan fakta bahwa jumlah pengamat kelas Pengembangan Kompetensi Manajerial yang bertugas di BPSDM Jabar pada tahun 2023 hanya berjumlah sekitar 10 orang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Kita kan ditahun 2023 itu ada sekitar 10 orang yang bertugas di PKA. Tapi kita juga ikut bantu untuk yang pelatihan PPPK, PKP, dan PKN. Jadi lumayan berat tugasnya. Soalnya kan kita selain pegang satu pelatihan, kita juga ikut bantu di yang lain juga. Jadi koordinasi tuh benar-bener harus diperhatiin. Kalo dulu mah lebih dari 10 pengamat kelas tuh, Cuma sejak covid ada pengurangan tenaga kerja di BPSDM. Mungkin karena efisiensi juga ya, terus kan ada refocusing juga.” (Wawancara, 1 Maret 2024)

Melalui keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa di tahun 2023 telah terjadi efisiensi tenaga kerja di bidang pengamat kelas. Hal ini tentu tidak berbanding lurus dengan beban kerja yang mereka emban sebagai pengamat kelas Pengembangan Kompetensi Manajerial. Yaitu dalam hal koordinasi antara pengamat kelas dengan widyaiswara dan peserta pelatihan, pemberian informasi (*link zoom*, redaksi kegiatan, dll), mengatur penginapan peserta pelatihan, membuat daftar hadir, dan segala keperluan berkenaan dengan kegiatan pelatihan.

Oleh karena itu, tugas seorang pengamat kelas cukup banyak dan kompleks untuk dikerjakan secara individu karena berhubungan secara langsung kepada para widyaiswara, peserta, dan penyelenggara pelatihan itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan data LKIP BPSDM Jabar 2023 yang menyebutkan bahwa jumlah peserta pelatihan PKM yang terfasilitasi di tahun 2023 berjumlah 12.761 peserta yang terdiri dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administartor (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi 10 orang pengamat kelas untuk mengurus berbagai keperluan pelatihan disetiap jenjang dan angkatan pelatihannya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengamat kelas ini merupakan pegawai non ASN (tidak tetap) yang dibayar secara honorer, Sukwan, THL yang dibayar menggunakan dana APBD, tapi sejak covid dan pemerintah daerah harus mengefisiensi anggaran yang ada, maka pengamat kelas dari unsur non ASN di tiadakan.

Ketersediaan Peserta Diklat/Pelatihan

Berbeda dengan badan pelatihan swasta atau badan diklat sejenis yang memerlukan usaha lebih untuk mendatangkan peserta, BPSDM Jabar tidak mengalami kesulitan dalam hal pengadaan peserta yang akan mengikuti kegiatan diklat/ pelatihan. Hal ini dikarenakan BPSDM Jabar merupakan badan yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepada ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi BPSDM sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia, yang meliputi sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis umum, Pengembangan kompetensi teknis inti, dan pengembangan kompetensi manajerial.

Oleh karena itu, calon peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan/diklat di BPSDM Jabar merupakan rekomendasi dari dinas/instansi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawainya. Berikut daftar peserta kegiatan PKA Angkatan IV di BPSDM Jabar pada tahun 2023 :

Tabel 2. Daftar Domisili Peserta PKA Angkatan IV Tahun 2023

Asal Instansi	Jumlah peserta
Kabupaten Bandung Barat	5 Orang
Kota Depok	5 Orang
Kabupaten Bekasi	4 Orang
Kabupaten Cianjur	1 Orang
Kabupaten Kuningan	5 Orang
Kabupaten Majalengka	4 Orang
Kabupaten Mempawai	5 Orang
Kejaksanaan Tinggi Republik Indonesia	3 Orang

Sumber : Laporan Kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023

Dari data tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah peserta kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023 di BPSDM Jabar berjumlah 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat sebagai peserta kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun jumlah peserta tersebut sudah sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan oleh LAN RI melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajerial yang menyatakan bahwa peserta pelatihan PKA di tahun 2023 sekurang-kurangnya terdiri dari 30 orang dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 40 orang

Memelihara keandalan sistem kegiatan dan kemampuan penyelenggara dalam beradaptasi

Memelihara keandalan sistem kegiatan dan kemampuan penyelenggara dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam mengukur efektivitas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Kegiatan PKA di tahun 2023 mulai diberlakukan sejak turunya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, yang kemudian diatur kurikulumnya melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Lebih lanjut, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) mengeluarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagai *guidance* bagi penyelenggara dalam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan struktural, termasuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar menjelaskan bahwa :

“Sudah ada aturannya dari LAN melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi negara no. 1 dan 2 tahun 2023. kalo kita kan pelatihan manajerial itu pasti bapaknya Lembaga Administrasi Negara, jadi gak boleh kita terlepas dari situ. Kurikulumnya juga sudah begitu (Sesuai dengan PERKALAN), waktunya ditentukan. Cuma jadwal dan SOP teknisnya aja yang kita atur. Tapi kalo

yang lainnya dari LAN. Harus sekian jam Pelajaran, harus aturannya tahap pertama apa dulu, tahap kedua dan seterusnya. Lalu seminarnya juga gitu. Apalagi yang PKN itumah semua dari LAN. Kita mah tinggal mengikuti aja.” (Wawancara, 16 Februari 2024)

Sehubungan dengan itu, didalam Peraturan Kepala Lembaga Administrator Negara No. 1 Tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Struktural, di sebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan PKA diselenggarakan secara terpadu yang kemudian disebut sebagai *blended learning*. Oleh karena itu, BPSDM Jabar sebagai penyelenggara kegiatan PKA dituntut untuk dapat beradaptasi dengan metode *blended learning* yang terbilang masih cukup baru di dunia pelatihan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar mengatakan bahwa :

“generasinya usia berapa sekarang, kelahiran tahun berapa, itu kan agak berbeda. Kalo generasi tahun kesini mah yang usiannya masih 40 kebawah senang dengan *blended learning* karena dia biasa belajar dimanapun kapanpun. berbeda dengan generasi kayak 39 keatas gitu ya, nah itu rada berat di kasih *blended tu*. Harus ngoprek lagi. Tapi kami sebagai penyelenggara terus melakukan penyesuaian dengan membuka banyak ruang diskusi, manatau ada WI atau peserta yang kesulitan dalam pengoperasian dan lain-lain. Tapi WI di BPSDM alhamdulillah tidak mengalami kesulitan dalam penyesuaian metode *blended*. Paling di awal-awal aja karena belum terbiasa, makanya kita berupaya untuk membiasakan penggunaan teknologi ini.” (Wawancara, 16 Februari 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, BPSDM Jabar selaku badan yang diberi mandat untuk menyelenggarakan PKA di tahun 2023 menyatakan bahwa memang ada perbedaan yang cukup signifikan dari penyelenggaraan pelatihan di tahun-tahun sebelumnya. Sedikitnya penyelenggaraan PKA secara *blended learning* ini membuat individu-individu berusia 39 tahun keatas untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pembelajaran. Berbeda dengan generasi Z dan milenial yang terbiasa dengan pemanfaatan teknologi, generasi X harus sedikit berusaha lebih keras untuk terbiasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengakses pembelajaran pada pelatihan PKA secara *blended learning*. Menyambung pernyataan tersebut, Widyaiswara PKA di Tahun 2023, berpendapat bahwa :

“Kalo dulu kan diklat itu sifatnya full di tempat ya. Jadi gak ada sistem online atau sekarangmah nyebutnya daring atau virtual. Nah dalam hal ini, WI di tuntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK yang ada sekarang. Apalagi sejak covid-19 kan semua serba online ya. kemudian kita sekarang di PKA menggunakan sistem *blended*. Campuran dari klasikal dan virtual. Gimana caranya? Ya kita pembelajaran sekarang berusaha untuk lebih interaktif. Pake video yang terkait dengan materi pembelajaran misalnya. Jadi kita lebih kearah sana sih. lebih mencari mana nih yang bisa di bawa ke materi pembelajaran.” (Wawancara, 13 Maret 2024)

Dari pernyataan tersebut, widyaiswara menyikapi perkembangan zaman, khususnya pada perkembangan teknologi informasi dan media pembelajaran posistif. Widyaiswara telah berupaya untuk mengoptimalkan efektivitas pembelajaran melalui media pembelajaran yang lebih beragam. Tidak hanya dengan metode ceramah, akan tetapi juga menggunakan video interaktif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran materi PKA Angkatan IV Tahun 2023. Kendati demikian, Widyaiswara tidak menampik bahwasanya terdapat kendala yang dirasakan pada pelaksanaan PKA Angkatan IV Tahun 2023. Sebagaimana ia menerangkan bahwa :

“Kadang-kadang masalah PLN mati, yang kedua masalah sinyal kadang-kadang kan yang virtual learning everywhere. Karena kalo pembelajaran virtual itu tidak di kantor tapi dimana saja. Saya ngajar, kadang dirumah kadang di sini (kantor). Yang penting tersampaikan pembelajarannya. Kalo misalkan si orang itu pas di kantor mendapat tugas, dia harus mengikuti. Dengan apa? Entah dengan HP apakah dengan laptop, atau yang lain sebagainya. Ternyata diperjalanan sinyal, kadang kala dalam proses pembelajaran itu dia ikut, ikut tapi sedang rapat. Jadi tidak fokus. Terus juga dia izin rapat dengan gubernur dengan bupati. Dinyalain tapi orangnya gak tau kemana. Tarus karena dia sibuk, kadang dia tidak mempelajari ketika MOOC. Dalam proses

MOOC kurang fokus karena belajar mandiri, jangankan waktu MOOC. Ketika virtual juga kadang rapat. Lalu, penguasaan IPTEK. lalu perubahan jadwal yang tidak terprediksi.” (Wawancara, 13 Maret 2024)

Pernyataan tersebut diatas menerangkan bahwasanya sistem pelaksanaan pelatihan yang dipakai pada pelaksanaan PKA Angkatan IV Tahun 2023 memiliki nilai positif dan negatif bagi peserta pelatihan. Terdapat beberapa kendala yang paling sering dialami oleh peserta maupun widyaiswara ketika pembelajaran virtual, diantaranya kendala sinyal yang tidak selalu stabil, ketersediaan listrik, fokus peserta yang mudah terpecah dengan kegiatan lain, serta perubahan jadwal yang tidak terprediksi. Akan tetapi, dalam menyikapi hal tersebut, Widyaiswara mengatakan bahwa BPSDM Jabar selaku penyelenggara kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023 menyikapi setiap kendala yang dihadapi dengan positif dan terbuka. Beliau mengatakan bahwa :

“Untuk kendala ini, kalo sifatnya seperti PLN atau jaringan internet kan gak bisa di prediksi ya, tapi untuk hal-hal lain yang kemudian menjadi Kendala itu memang kita udah punya sistem komunikasi sendiri ya. Sistemnya itu kan kita WI itu dibagi kelompok ya, isinya ada 10 WI yang bertugas secara bergantian setiap tim. Jadi kita masing-masing punya spesialisasinya. Ketika kita dihadapkan pada masalah, biasanya kita koordinasi dulu di internal kelompok tadi. Gimana nih ada masalah seperti ini, apa solusinya. ketika masalahnya dirasa belum bisa selesai baru kita diskusi, perlu nggak berkonsultasi dengan koorwi, atau perlu nggak kita diskusi dengan kaban. Jadi kekuatan utamanya memang di koordinasi.” (Wawancara, 13 Maret 2024)

Lebih lanjut, selain kemampuan penyelenggara dalam beradaptasi dengan sistem pembelajaran, dimensi pendekatan pada sumber juga diukur melalui kemampuan peserta pelatihan dalam beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang diterapkan pada kegiatan pelatihan. Adapun peserta berpendapat bahwa:

“kalo soal penggunaan perangkat pelatihan seperti zoom alhamdulillah gak ada masalah karena kan kita sudah biasa juga ya pasca covid, tapi untuk LMS yang kadang-kadang beberapa peserta masih ada kesulitan. Tapi yang saya rasakan, sistem blended yang pake di pelatihan ini kurang optimal ya. Karena kan ada sistem daring dan luring, jadi ketika masa nya dimana pembelajaran sedang daring, terkadang kurang bisa fokus karena kadang suka ada kerjaan di kantor yang menunggu untuk dikerjakan.” (Wawancara, 14 Maret 2024)

Dari pemaparan narasumber diatas, maka dapat diketahui bahwa narasumber tidak mengalami kendala pada pemanfaatan teknologi sebagai sarana penunjang pelatihan, walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa menurut keterangan salah satu narasumber, beberapa peserta lainnya masih mengalami kendala dalam penggunaan LMS (*Learning Management System*).

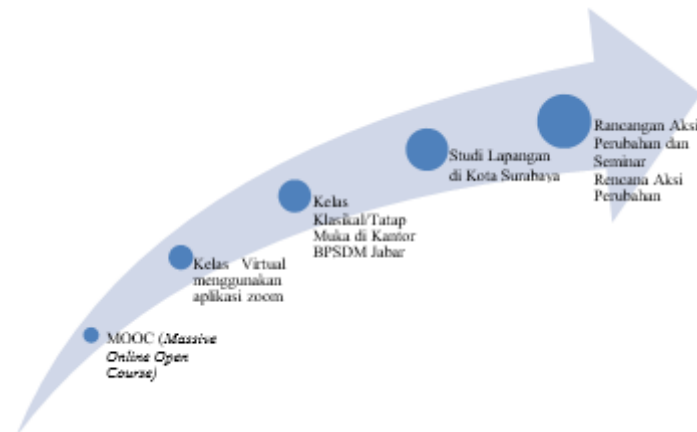
Di lain sisi, peserta berpendapat bahwa perlu adanya pengkajian ulang berkenaan dengan sistem pembelajaran (*blended learning*) yang digunakan pada kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023. Hal ini berkaitan dengan pecahnya konsentrasi peserta pelatihan jika masih dibebani oleh tugas dari kantor unit kerjanya ketika kegiatan pelatihan masih berjalan. Hal tersebut lebih sering dirasakan peserta ketika agenda pembelajaran kelas virtual. Akibatnya, peserta merasa tidak optimal dalam menyerap setiap materi yang disampaikan oleh widyaiswara ketika pembelajaran daring di kelas virtual.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan kegiatan PKA di tahun 2023 memang terbagi kedalam beberapa metode pembelajaran. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Struktural yang mengatakan bahwa *blended learning* merupakan pembelajaran terpadu yang menggabungkan antara jalur pendidikan Klasikal dan non Klasikal. Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar mengatakan bahwa :

“kita belajar lebih ke blended learning. Dulu kan waktu masih klasikal kita beberapa bulan pelatihan di BPSDM kalo sekarang kan blended learning. Blended itu lebih banyak, ada belajar mandiri, nah itu kan belajar mandiri kan belajar tanggung jawab. Kita diberikan keleluasaan

belajar selama dua minggu misalkan dia kan harus belajar, tanpa harus di suruh kan gitu, ini jadwalnya silahkan dipelajari. Sok apa yang bisa kalian baca, dari situ masuk ke tahapan kedua ada dosen pembimbing gitu kan? Di situ kan di runutkan lagi cara berpikir kita. Kan di awal-awal sudah ada tugas tuh. Walaupun pakai namanya belajar mandiri, tapi tugasnya tetep harus dilakukan. Kalo belajarnya sebatas gak serius, pasti gak dapet apa-apa. Kalo serius pasti dapet manfaat. Buat apa? Buat organisasi.” (Wawancara, 16 Februari 2024)

Dari pernyataan di atas, Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar menerangkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati oleh peserta kegiatan PKA untuk dinyatakan lulus sebagai alumni dan meraih sertifikat kompetensi manajerial mereka sebagai seorang pejabat administrator. Adapun jika di gambarkan, berikut tahapan yang harus di lewati oleh peserta PKA Angkatan IV tahun 2023 :



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan PKA secara blended learning Angkatan IV Tahun 2023

Sumber : Hasil Wawancara dengan penyelenggara kegiatan PKA di tahun 2023 (Olahan Penulis)

Dari gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati oleh peserta pelatihan. Diantaranya ada proses pembelajaran mandiri yang memberikan peserta keleluasaan untuk mengeksplor materi yang di bagikan oleh penyelenggara. Adapun kemudian pembelajaran mandiri ini di sebut MOOC (*Massive Open Online Course*) yang didalamnya peserta akan diberi tugas individu berkenaan dengan agenda pembelajaran mandiri. Setelah mengikuti tahap MOOC dengan baik, peserta diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan diskusi secara interaktif ketika agenda pembelajaran di kelas bersama widyaiswara. Berkenaan dengan hal tersebut, Widyaiswara menerangkan bahwa :

“Memang ini tantangan bagi kita, kita menyadari bagaimana para pejabat kita tuh sebgiaan masih gaptek. Didalam IT seperti ini, kita pelan-pelan, caranya itu betul-betul menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Para Wi kan di tuntutan kepiawaiannya kan di dalam menyikapi hal-hal tersebut. Kita di tuntutan bagaimana dengan kondisi seperti itu tapi materi masuk. Ari siswanya seperti anak jaman sekarang mah no problem tapi ari siswanya pejabat-pejabat kita yang ada di tataran ujung tombak pemerintahan itu kadang-kadang kita terkendala. Tapi lama-lama mereka terbiasa. Kita beri pengertian kepada instansi pengirim, bahwa harus mempersiapkan pegawai yang seperti ini seperti ini. Untuk gaya belajarnya mah mangga saya serahkan ke masing-masing WI bagaimana caranya dengan kondisi seperti itu, tapi materi bisa masuk.” (Wawancara, 13 Maret 2024)

Dari pemaparan di atas, terkonfirmasi bahwa penyelenggara sudah melakukan usaha maksimal untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi selama kegiatan PKA Angkatan IV tahun 2023.. Adapun kendala yang dialami oleh penyelenggara (dalam hal ini Widyaiswara) adalah beberapa pejabat yang kemudian menjadi peserta kegiatan PKA ditahun masih kurang dalam memahami penggunaan IPTEK pada proses kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, hal tersebut di siasati oleh Widyaiswara dengan melakukan komunikasi kepada instansi yang akan mengirimkan peserta pelatihan guna menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengikuti kegiatan pelatihan PKA di tahun 2023

Pendekatan Proses

Kordinasi Internal Berjalan dengan Baik

Untuk mengetahui pendekatan efektivitas dari pelaksanaan PKA di tahun 2023, maka kelancaran proses koordinasi internal merupakan aspek yang mempengaruhi efektivitas dari kegiatan tersebut. Berkenaan dengan koordinasi internal tersebut, Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar mengatakan bahwa :

“koordinasi kami di internal penyelenggara alhamdulillah lancar. Kita selalu melakukan koordinasi dan menjaga komunikasi dengan baik. kebetulan kami kan bekerja sebagai tim. Jadi ada sekitar 19 orang yang masuk kedalam susunan panitia penyelenggara PKA angkatan IV tahun 2023. Nah masing-masing punya jobdesk yang berbeda. Ada yang mengurus urusan administrasi, komunikasi dengan peserta, instansi, dengan para WI, lalu kemudian juga ada yang mengurus urusan teknis pada pelaksanaan diklat, dan lain sebagainya.” (Wawancara, 16 Februari 2024)

Dari keterangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan proses diklat, BPSDM Jabar selaku penyelenggara kegiatan pelatihan membentuk suatu kepanitiaan yang kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi satu sama lain agar proses pelatihan bisa berjalan dengan efektif. Pengamat Kelas PKA Tahun 2023 juga memberikan keterangan bahwa :

“PKA ini kan memang sudah menjadi tanggung jawab bidang 4, kebetulan di bidang 4 semuanya sudah terkonsep dengan baik. Jadi kita udah punya jobdesk masing-masing. udah ada yang mengatur dibagian administrasi, ada yang mengatur urusan fasilitas, ada yang menjadi pengamat, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Untuk proses koordinasinya juga alhamdulillah udah berjalan dengan baik” (Wawancara, 1 Maret 2024)

Dari pemaparan diatas, semakin memperkuat pernyataan bahwa koordinasi internal dari penyelenggara termasuk bidang yang menangani sudah berjalan dengan baik karena masing-masing sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

“.. yang kita lakukan selama ini, komunikasi itu ada yang langsung ada yang pakai medsos gitu ya. Misalnya kita lagi kegiatan penuh kita medsos, pake telepon, Wa dan ada setiap kita ada evaluasi baik persiapan itu dipimpin oleh kepala badan langsung.” (Wawancara, 13 Maret 2024)

Terkait metode komunikasi yang dilakukan oleh widyaiswara, melalui pernyataan diatas diketahui bahwa ada dua pendekatan atau metode komunikasi yang dilakukan oleh widyaiswara pada proses pelaksanaan PKA angkatan IV tahun 2023. Yaitu, metode langsung berupa pengkoordinasian secara tatap muka dan metode tidak langsung yang memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi *whatssapp* dan *telephone*.

Proses Komunikasi antar bagian terjalin dengan baik dan adanya kerja sama serta konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan acuan kepentingan kegiatan

Selain proses komunikasi vertikal yang berjalan dengan baik, proses komunikasi horizontal juga menjadi aspek yang penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan PKA Angkatan IV tahun 2023. Oleh karena itu, Widyaiswara Jabar menjelaskan bahwa :

“Kemarin kami membuat pola pengaturan itu ada 3 kelompok WI. Jadi setiap kelompok itu ada 10 org dan ada ketua kelompoknya. jadi ketika ada masalah mereka diskusi dulu di kelompoknya, ketika masalahnya belum terselesaikan baru kita berembuk, perlu nggak Solusidan koorwi, atau perlu nggak Solusi dari kaban. Jadi nanti lapor ke pimpinan jika ada masalah yang belum menemukan solusinya. Nanti biasanya di undang lah WI untuk diskusi dan baru kami menyampaikan masalah ke kaban. Dan itu sering ada arahan dari kaban.” (Wawancara, 13 Maret 2024)

Melalui pernyataan tersebut diatas, dapat terlihat bahwa sistem komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan PKA Angkatan IV tahun 2023 memiliki hirarki yang kemudian menjadi metode penyelesaian masalah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Widyaiswara membentuk 3 kelompok yang terdiri dari 10 orang untuk memudahkan proses penyelesaian masalah yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan. Sistem diskusi 10 orang ini membuat Widyaiswara memiliki ruang untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan efisien, akan tetapi ketika permasalahan tidak dapat menemukan titik temu yang paling solutif maka Koordinator Widyaiswara yang menyampaikan permasalahannya secara langsung kepada Kepala Badan

Dari pemaparan-pemaparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan PKA secara Angkatan IV tahun 2023 di BPSDM Jabar sudah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Dari segi koordinasi internal bidang penyelenggara sudah mampu melakukan sistemasi yang efektif antara sesama penyelenggara maupun dengan tenaga pengajar atau widyaiswara. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan PKA secara Angkatan IV tahun 2023.

Pendekatan Sasaran

Melihat Tingkat Penyelenggara Dalam Mencapai Sasaran Kegiatan

Keberhasilan penyelenggara dalam mencapai sasaran kegiatan merupakan hal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PKA secara *blended learning* di Angkatan IV Tahun 2023. Adapun dari segi jumlah peserta, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Manajerial di sebutkan bahwasanya pada pelatihan kepemimpinan administrator di tetapkan batas minimum jumlah peserta sebanyak 30 orang dan maksimal 40 orang Pegawai Negeri Sipil yang sudah duduk atau akan dipromosikan untuk duduk di jabatan administrator. Berkenanaan dengan hal tersebut, Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar menerangkan bahwa :

“Peserta PKA tahun di 2023, khususnya di Angkatan IV itu ada sekitar 31 orang yang berasal dari beberapa instansi yang beda-beda. Kalo kita liat di aturan PERKALAN alhamdulillah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena memang di aturannya itu kita minimal 30 orang dan maksimal di 40 orang yang sudah atau akan dipromosikan untuk menduduki jabatan administrator pada setiap angkatannya.” (Wawancara, 16 Februari 2024)

Dari keterangan tersebut, penulis mencoba melakukan konfirmasi kepada widyaiswara PKA Tahun 2023 yang mengatakan bahwa :

“Untuk jumlah peserta PKA di tahun 2023 itu kalo di tanya jumlahnya udah pasti banyak ya. Karena kan ada 6 angkatan. Tapi buat Angkatan IV kalo tidak salah ada sekitar 30an orang. gak sampe 40. Tapi itu sudah sesuai sama aturan PERKALAN yang menyebutkan batas minimum satu kelasnya 30 orang dan paling banyak 40 orang.” (Wawancara, 13 Maret 2024)

Tabel 3. Jabatan dan Asal Instansi Peserta Kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023

No	Jabatan dan Asal Instansi
1	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Manusia Kabupaten Bandung Barat
2	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Manusia Kabupaten Bandung Barat
3	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Kabupaten Bandung Barat
4	Kepala Bidang Pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat
5	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat
6	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Sehat Kota Depok
7	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok
8	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD Kota Depok
9	Camat pada Kecamatan Bojongsari Kota Depok
10	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kota Depok
11	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kabupaten Mempawah
12	Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah
13	Sekretaris pada Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah

	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah
14	Sekretaris pada Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah
15	Koordinator pada kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kejaksaan Republik Indonesia
16	Koordinator pada kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kejaksaan Republik Indonesia
17	Koordinator pada kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Kejaksaan Republik Indonesia
18	Koordinator pada kejaksaan Tinggi Riau Kejaksaan Republik Indonesia
19	Sekretaris pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
20	Kepala Bidang pengendalian dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
21	Camat pada Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
22	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
23	Camat Pada Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur
24	Camat Pada Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
25	Camat Pada Kecamatan Sindangsari Kabupaten Indramayu
26	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.A.Sentot Patrol Kabupaten Indramayu
27	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu
28	Kepala Bidang Penyediaan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
29	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung
30	Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bandung
31	Kepala Bidang Perencanaan , Pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung

Sumber : Laporan Kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023

Dari data yang disajikan diatas, Maka diketahui bahwa jumlah peserta PKA Angkatan IV Tahun 2023 berjumlah tidak lebih dari 40 orang. hal ini sesuai dengan pernyataan Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar dan Widyaiswara sebelumnya yang mengatakan bahwa jumlah peserta PKA Angkatan IV Tahun 2023 berjumlah 31 orang. Selain itu, terdapat pula sasaran kegiatan PKA Angkatan IV yang berhasil diselenggarakan Oleh BPSDM Jabar. Hal ini sesuai dengan muatan bahan ajar yang tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. Agenda Pelatihan PKA Tahun 2023

Agenda Pelatihan	Jam Pelajaran	Metode
Kepemimpinan dan Nasionalisme	66 JP	MOOC (<i>Massive Online Open Course</i>)
Kepemimpinan Kinerja	104 JP	<i>E- Learning</i>
Manajemen Kinerja	149 JP	Klasikal/Tatap Muka
Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja	22 JP	Klasikal/Tatap Muka
Total JP	908 JP	

Sumber : Laporan Kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023

Lebih lanjut, Pimpinan Penyelenggara Diklat BPSDM Jabar mengatakan bahwa pada tahun 2023, BPSDM Jabar sebagai badan diklat yang diberi mandat untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menjalankan ketentuan yang berlaku pada pedoman penyelenggaraan diklat kepemimpinan. Ia mengatakan bahwa :

“Kegiatan PKA ini kan induknya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) jadi kita sudah barang tentu mengikuti kesana. Untuk capaiannya, alhamdulillah susah sesuai dengan aturan di keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tentang Kurikulum Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural. Kita menggunakan metode blended yang

didalamnya ada pembelajaran secara mandiri atau MOOC, Kelas virtual, dan tatap muka .“
(Wawancara, 16 Februari 2024)

Melalui pernyataan dan data tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BPSDM Jabar sebagai penyelenggara kegiatan sudah menyelenggarakan kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023 sesuai dengan sasaran yang di buat oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) melauai Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

SIMPULAN

Berlandaskan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan Administrator oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, maka dapat diketahui bahwa :

1. Pendekatan Sumber : Penyelenggara mampu menyediakan sarana prasarana penunjang kegiatan pelatihan dengan baik, penyelenggara tidak mengalami kesulitan dalam mencari peserta karena peserta dikirim atas rekomendasi dinas tempat peserta bekerja, terdapat kendala pada aspek yang ketersediaan SDM di bidang pengamat kelas.
2. Pendekatan Proses : Penyelenggara mampu melakukan koordinasi dan komunikasi internal maupun antar bagian dengan baik, penyelenggara juga mampu membuat sistem penyelesaian masalah dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang dibuat dalam efektivitas pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) di BPSDM Jabar terkendala pada aspek adaptasi peserta pada kegiatan berbasis *blended learning* yang masih belum optimal .
3. Pendekatan Sasaran: Kegiatan PKA Angkatan IV Tahun 2023 sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh penyelenggara, yakni peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan berasal dari ASN berstatus PNS sudah menjabat atau akan dipromosikan menjadi pejabat administrator. Begitupun dengan kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Struktural

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara. (2024). *Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II* .
- Chandra, R. (2020). *Pendekatan Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan Administrator Yang Dilaksanakan Secara Daring*. Universitas Padjadjaran.
- Emir. (2024, January 17). Jumlah PNS Tua Makin Sedikit, 52% dikuasai Kaum Milenial. *CNBC Indonesia*. Oktarina, A., & Mustam, M. (2018). *MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKPPD) KOTA PEKALONGAN*. www.fisip.undip.ac.id
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susan, E. (2019). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*.
- Syafri, W., & Alwi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Rincian, Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Laporan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV Tahun 2023
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2023